

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM, 2024), pada tahun 2023, total UMKM mencapai 64,2 juta dengan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau setara dengan Rp8. 573,89 triliun. UMKM mampu bertahan meskipun menghadapi krisis seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19. Selain itu, sektor ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilan setiap individu serta meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) masyarakat, karena mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam Bab 1 yang berisi ketentuan umum, Pasal 1 menjelaskan bahwa usaha mikro adalah jenis usaha yang menghasilkan produk dan dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Usaha kecil diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan mandiri, yang dilakukan oleh individu atau entitas usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan mana pun yang dimiliki, dikuasai, atau terhubung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan yang dijelaskan dalam undang-undang ini. Usaha menengah merupakan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan beroperasi secara independen. Kegiatan ini dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terhubung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM adalah sektor yang sangat penting dan memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi negara, terutama dalam menciptakan peluang kerja, mengurangi ketimpangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada masyarakat. UMKM merupakan sektor yang mendominasi struktur ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sudah melebihi 65 juta unit. Usaha-usaha tersebut tersebar di berbagai bidang, seperti perdagangan, industri, pertanian, dan jasa, termasuk sektor kuliner, pakaian, kerajinan tangan, serta teknologi digital. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting, terutama di daerah-daerah terpencil, karena mampu menciptakan lapangan kerja, menyebarluaskan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan perekonomian lokal. Mengingat kontribusi yang besar dari UMKM, pemerintah memiliki kebijakan yang sudah ditetapkan untuk mendukung pengembangan sektor tersebut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah untuk, pemerataan kesempatan kerja, pendapatan pengentasan kemiskinan, penguatan daya saing nasional, mendukung ketahanan ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya.

UMKM telah berkembang menjadi salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM terbukti mampu bertahan dalam situasi krisis dan bahkan berperan sebagai pendorong pemulihan ekonomi di waktu-waktu sulit, termasuk pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Namun, secara umum, UMKM di berbagai wilayah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, di antaranya adalah akses keuangan, pemasaran dan promosi, infrastruktur dan teknologi, serta masalah regulasi dan birokrasi, dan juga kurangnya keterampilan serta pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan kontribusi dari berbagai pihak terkait untuk memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu penggerak

pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, seperti Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2023 tentang *Pusat Layanan Usaha Terpadu*, yang menekankan perlunya layanan pelatihan dan pendampingan berbasis kebutuhan. Pemerintah sangat memperhatikan perkembangan UMKM agar mereka bisa tetap bertahan dalam kondisi krisis global. Pemerintah melalui Kemenkop UKM terus berusaha agar semakin banyak orang mau berpartisipasi dalam dunia kewirausahaan dengan cara mendirikan UMKM. Penekanan yang kuat dari pemerintah terhadap UMKM merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi negara Indonesia dengan tujuan untuk memajukan UMKM di tanah air. Namun, efektivitas program tersebut tidak akan berjalan kecuali adanya kesadaran untuk meningkatkan kualitas pelaku UMKM agar mereka mampu menghadapi tantangan usaha dengan lebih adaptif dan kompetitif. Kebutuhan belajar pelaku UMKM harus dipetakan dengan baik sehingga pelatihan dan pendampingan yang diberikan benar-benar relevan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas usaha mereka.

Penelitian Rahmatullah tahun 2022 yang berjudul *Analisis Kebutuhan Pelatihan untuk Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM (Studi di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Pamekasan)* menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam aspek manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan karena kurangnya pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan aktual mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*) dalam merancang program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). UMKM pada sektor SDM tentu ingin selalu memiliki pelaku-pelaku UMKM yang berkualitas, yang berarti memenuhi kriteria kompetensi untuk dapat digunakan dalam usaha mencapai visi dan tujuan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Ini menunjukkan bahwa manajemen SDM perlu melaksanakan tugasnya dengan benar dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun indikator kualitas SDM yaitu, berupa pengetahuan, keterampilan dan kemampuan

seorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional (Sutrisno, 2016). SDM yang berkualitas menjadi salah satu faktor kunci bagi kesuksesan sebuah usaha. Apabila perbaikan kualitas sumber daya manusia tidak dilaksanakan dengan benar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi yang selalu berkembang.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram @kotajakartatimur, di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Kelurahan Pinang Ranti, pernah diadakan acara bazar untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di halaman kantor kelurahan tersebut. Acara ini diikuti oleh 30 pelaku usaha rumah tangga pada bulan Juni 2022. Bazar ini menyediakan 15 tenda bagi para pelaku UMKM yang menjual berbagai produk seperti makanan, minuman, camilan, aksesoris, pakaian, dan lain sebagainya. Kegiatan ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Pinang Ranti terdapat berbagai jenis usaha UMKM, mulai dari sektor makanan hingga jasa.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, tidak semua UMKM di Kelurahan Pinang Ranti dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan bahkan mengalami kesulitan untuk berkembang, sehingga usaha-usaha tersebut tidak mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Sebagian usaha hanya dapat bertahan dalam periode yang singkat, padahal jika pelaku UMKM lebih inovatif dalam menemukan dan memanfaatkan peluang, mereka bisa mencapai kemajuan yang lebih baik. Di wilayah ini, belum ditemukan secara spesifik data yang mengidentifikasi kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Kondisi ini menjadi alasan kuat mengapa identifikasi kebutuhan belajar perlu dilakukan terlebih dahulu. Tanpa pemetaan yang jelas, program pelatihan berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, atau bahkan tidak diminati oleh pelaku UMKM itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi Kebutuhan Belajar Pelaku UMKM di Kelurahan Pinang Ranti”.

Penelitian ini berfokus pada para pengusaha UMKM di bidang kuliner yang berada di Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar,

Jakarta Timur. Lokasi ini dipilih karena banyaknya kegiatan ekonomi mikro berbasis rumah tangga, terutama di bidang makanan dan minuman, yang tumbuh secara informal namun memiliki potensi ekonomi yang besar. Bidang kuliner dipilih karena jenis usaha ini paling banyak ditemukan dan dominan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan informasi tersebut dan menjadi dasar yang kuat untuk menyusun program pelatihan dan pembinaan UMKM tepat dan berdampak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan belajar pelaku UMKM kuliner di Kelurahan Pinang Ranti, agar dapat diketahui kebutuhan belajar yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha. Fokus pemetaan mencakup aspek-aspek penting seperti manajemen dan keuangan, produksi, pemasaran dan promosi, pemanfaatan teknologi, layanan konsumen, legalitas dan administrasi usaha. Hasil pemetaan ini diharapkan menjadi dasar untuk perencanaan program pelatihan atau pembinaan yang lebih tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan, serta kompleksitas usaha kuliner secara fisik sangat sulit. Dengan adanya pemetaan yang telah dilakukan, diharapkan dapat membantu dalam pembentukan program yang dapat mendorong pertumbuhan usaha kuliner secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bidang kuliner di Kelurahan Pinang Ranti, tetapi juga menyajikan analisis kebutuhan belajar yang dapat digunakan oleh pihak pemerintah, swasta, maupun lembaga pelatihan dalam menyusun strategi pemberdayaan UMKM secara lebih efektif. Pemetaan ini juga mendukung implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip *circular economy* dan *green economy*, yang mendorong efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, penggunaan kembali bahan, serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama pelaku UMKM di Kelurahan Pinang Ranti, yaitu:

1. Belum terdapat data yang spesifik dan akurat mengenai kebutuhan belajar pelaku UMKM di wilayah tersebut.
2. Belum diketahui secara pasti jenis keterampilan dan pengetahuan apa saja yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.
3. Belum jelas apakah program pelatihan atau pembinaan yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku UMKM di Kelurahan Pinang Ranti.
4. Potensi ketidakefektifan program pelatihan jika tidak berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar secara komprehensif.
5. Kurangnya informasi yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dan lembaga terkait untuk merancang program pemberdayaan UMKM yang tepat sasaran.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka pembatasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pelaku UMKM yang berdomisili di Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
2. Fokus penelitian adalah identifikasi kebutuhan belajar terkait aspek manajemen dan keuangan, produksi, promosi dan pemasaran, pemanfaatan teknologi, layanan konsumen, legalitas dan administrasi.
3. Penelitian ini tidak membahas evaluasi terhadap program pelatihan yang sudah ada atau belum ada di wilayah tersebut.
4. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari pelaku UMKM melalui survei dan observasi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apa saja kebutuhan belajar pelaku UMKM di Kelurahan Pinang Ranti?

E. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar pelaku UMKM di Kelurahan Pinang Ranti sebagai dasar dalam perencanaan program pelatihan yang tepat sasaran dan efektif.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam studi pendidikan nonformal dan penguatan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan identifikasi kebutuhan belajar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta berfungsi sebagai acuan akademis bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pelaku UMKM. Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai jenis keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.
- b. Bagi lembaga pemerintah atau swasta yang bergerak dalam bidang pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan riil pelaku usaha.
- c. Bagi pendidik dan fasilitator pelatihan. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun kurikulum atau materi pelatihan yang kontekstual dan aplikatif.